GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

A l a m a t : Kompleks kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800/371/GUB- PBD/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
FORMASI TAHUN 2024

Bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategi nasional maka perlu menambah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam formasi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2024; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2024; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 Agustus 2024. Maka Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN PNS

A. ALOKASI KEBUTUHAN PNS

Alokasi kebutuhan PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan menggunakan Formasi Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran I.

B. JENIS FORMASI PNS

Jenis formasi untuk pengadaan PNS dengan menggunakan formasi tahun 2024 terdiridari:

1. Orang Asli Papua (OAP); dan
2. Non Orang Asli Papua (Non OAP).

C. KRITERIA PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi tahun 2024 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat dengan kriteria:

1. OAP dan
2. Non-OAP.

D. PRESENTASE FORMASI CPNS

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 presentase sebagai berikut :

3. Orang Asli Papua (OAP) paling banyak 80% dari jumlah formasi;
4. Non Orang Asli Papua (Non OAP) paling banyak 20% dari jumlah formasi;

II. PERSYARATAN UMUM BAGI SELURUH PELAMAR

Bagi seluruh pelamar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar. Batas usia tersebut ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran Khusus **Orang Asli Papua (OAP) ;**
4. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar. Batas usia tersebut ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran Khusus **Non Orang Asli Papua (Non OAP)** ;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikandengan:
    a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
    b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditas pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan

Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

c. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
d. Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
e. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diperoleh dari:
   1. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
   2. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

11. Transkrip/daftar nilai asli bagi SLTA/SMK/Sederajat;
12. Transkrip Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip Nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
13. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
14. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
15. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan tidak mengajukan pindah keluar dari Provinsi Papua Barat Daya dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas tahun) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
16. Memiliki KTP, di prioritaskan yang ber-KTP diwilayah Provinsi Papua Barat Daya.

III. Persyaratan Khusus

1. Bagi Pelamar Orang Asli Papua (OAP)

OAP dibuktikan dengan melampirkan :

1) Akte Kelahiran;
2) Surat Keterangan dari Lembaga Masyarakat Adat yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.

2. Bagi Pelamar Tenaga Klasifikasi Tenaga Kesehatan

1. *(Wajib)* Apoteker Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
2. *(Wajib)* Nutrisionis Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamar wajib membaca dengan cermat seluruh pengumuman dan panduan/petunjuk pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan proses pendaftaran. Kelengkapan seluruh dokumen lamaran disampaikan dengan cara mengunggah (upload) file hasil scan dokumen asli sesuai dengan persyaratan formasi jabatan melalui portal ***https://sscasn.bkn.go.id*** tanpa pengiriman berkas fisik (paperless). Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 20 Agustus s.d. 13 September 2024

Proses pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun Anggaran 2024 melalui portal ***https://sscasn.bkn.go.id*** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pelamar membuat akun pada ***https://sscasn.bkn.go.id*** dengan cara:
   1) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga yang tercantum

pada Kartu Keluarga (KK) pelamar;
2) Mengisi data identitas sesuai KTP;
3) Mengunggah KTP;
4) Melakukan swafoto;
5) Memastikan seluruh data yan telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
6) Mencetak Kartu Informasi Akun.

b. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman ***https://sscasn.bkn.go.id*** denganmenggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
c. Pelamar melengkapi data diri;
d. Pelamar memilih jenis seleksi yaitu seleksi PNS;
e. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) formasi jabatan dan 1 (satu) isntansi;
f. Pelamar memilih jenis formasi, pendidikan, klasifikasi formasi yang akan dilamar, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi (sebagaimana dalam lampiran I) dan mengisidata IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuaiijazah), nama program studi, dan akreditasi;
g. Pelamar mengunggah :
   1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah;
   2. Surat lamaran yang diketik dan dicetak dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan ditandatangani dengan tinta hitam diatas E-Materai 10.000 sesuaiformat pada Lampiran I;
   3. Dokumen persyaratan umum sesuai dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf A
   4. Dokumen persyaratan khusus sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar denganketentuan pada angka Romawi II huruf B;
   5. Surat pernyataan tidak minta pindah yang ditandatangani diatas E-Materai 10.000sesuai format pada Lampiran II;
   6. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani diatas E-Materai 10.000 sesuai format pada Lampiran III;
h. Ketentuan lain dokumen persyaratan yang wajib diunggah pelamar yaitu:
   1. Seluruh dokumen yang diunggah/upload adalah dokumen asli dengan scan berwarna (scan tidak berwarna atau hitam putih tidak berlaku dan/atau scan dokumen hasil salinan/fotocopi atau scan fotocopi legalisir tidak berlaku) kecuali bukti sertifikat akreditasi dari BAN-PT dan/atau LAMPT-KES/PUSDIKNAKES dapat berupa salinan/fotocopi sertifikat;
   2. Scan harus jelas dan terbaca dengan memastikan hasil scan sesuai dengan ketentuansebelum di upload/unggah;
   3. Apabila terdapat lebih dari satu dokumen/lembar pada masing-masing persyaratan maka dokumen digabung menjadi satu file;
   4. File masing-masing yang diupload sesuai dengan batas maksimal file yang dapat diunggah pada sistem SSCASN.
i. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar dan dokumen terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
j. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (**pelamar sudahtidak dapat mengubah data kembali**).

V. TAHAPAN SELEKSI

A. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKD) dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test*
   (CAT) BKN Seleksi kompetensi dasar, yang memuat :
   b. tes wawasan kebangsaan (TWK);
   c. tes intelegensia umum (TIU);
   d. tes karakteristik pribadi (TKP).
3. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebanyak 110 butir soal dengan rincian sebagai berikut:
   a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
   b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
   c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
4. Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yaitu:
   a. untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salahatau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
   b. untuk materi soal TKP bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dannilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKD) dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 02 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 06 September2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2024 oleh Peserta seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman pasca masa sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 01 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	02 s.d 08 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	09 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November 2024 s.d 03 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	04 s.d 08 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	09 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 04 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	05 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025

28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Jika terdapat perubahan jadwal akan disampaikan melalui pengumuman resmi di website,media sosial dan saluran telegram resmi BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan seleksi bertempat di :

1. Ruang Laboratorium CBT Poltekes Kota Sorong;
2. Universitas Muhammadiyah Kota Sorong .

VIII. LAIN-LAIN

a. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
b. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
c. Panitia seleksi pengadaan PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Formasi Tahun 2024 tidak menerima berkas fisik baik baik secara langsung maupun via pos/paket;
d. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi,dapat mengajukan sanggah melalui laman ***https://sscasn.bkn.go.id*** paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
   Panitia Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Formasi Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
e. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
g. Apabila usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) disebabkan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi menyangkut keabsahan/legalitas ijazah, kualifikasi pendidikan, maupun usia maka kelulusan pelamar dinyatakan gugur;
h. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atau Panitia sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
i. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari:
   1) mengundurkan diri;
   2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumendalam batas waktu yang ditentukan;
   3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Menteri;

4) tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
5) meninggal dunia.

maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

j. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya;

k. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;

l. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat menghubungi narahubung pada nomor *WhatsApp* 082248500149/082248500158 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d 16.00 WIT atau melalui alamat email bkpsdmpapuabaratdaya@gmail.com

m. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan diumumkan secara resmi melalui situs https://papuabaratdayaprov.go.id dan/atau pada situs BKN https://sscasn.bkn.go.id
Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

n. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta;

o. Kesalahan peserta dalam mengunggah dokumen pendaftaran menjadi tanggung jawabpeserta.

p. Keputusan Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

q. Hal - hal yang bersifat khusus akan diatur sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sorong, 22 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Dr. Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
4. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
5. BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
6. BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
7. Arsip.

Lampiran : I
Nomor : 800/371/GUB-PBD/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

PENETAPAN KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	lokasi_formasi	JUMLAH FORMASI		
				1088	ORANG ASLI PAPUA	NON ORANG ASLI PAPUA
					870	218
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS	OAP	1	
2	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI, DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	2	
3	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI	OAP	3	
4	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA | SUB BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM, DUNIA USAHA DAN INVESTASI	OAP	2	

5	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	1	
6	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM	OAP	5	
7	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN	OAP	35	
8	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI	OAP	3	
9	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN BANTUAN HUKUM | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	2	
10	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH III	OAP	2	

11	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	OAP	2	
12	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATA LAKSANA | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	1	
13	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS DAN PENATAAN URUSAN	OAP	2	
14	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH II	OAP	2	
15	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA INDUSTRI - S-1 TEKNIK INDUSTRI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI INDUSTRI NON AGRO	OAP	2	

16	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	OAP	3	
17	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN ASET	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	OAP	1	
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	OAP	3	
19	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	3	
20	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 FILSAFAT - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SEJARAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT ADAT	OAP	2	
21	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	OAP	3	

22	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK KESELAMATAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | SEKSI KEDARURATAN DAN DAN LOGISTIK	OAP	1	
23	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OAP	3	
24	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	OAP	4	
25	OPERATOR ALAT BERAT	D-III TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	OAP	1	
26	PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OAP	3	
27	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN - D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN PAJAK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	OAP	3	

28	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN	OAP	1	
29	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	OAP	2	
30	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWSIATA	OAP	1	
31	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	2	
32	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	OAP	3	
33	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	OAP	2	

34	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA	OAP	1	
35	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	OAP	3	
36	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	OAP	3	
37	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
38	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH	OAP	2	
39	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OAP	1	

40	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	OAP	3	
41	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III KEARSIPAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI REHABILITASI ANAK DAN LANJUT USIA	OAP	1	
42	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU POLITIK - S-1 KONSERVASI HUTAN - S-1 BISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	OAP	3	
43	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	OAP	1	
44	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI MINERAL DAN BATU BARA	OAP	7	
45	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OAP	1	

46	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN I	OAP	1	
47	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	OAP	2	
48	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEARSIPAN - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	1	
49	PEMELIHARA TUMBUHAN	SMA IPA - SMK KEHUTANAN - SMA IPS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	OAP	2	
50	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI MANAJERIAL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG FISIK PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM,PERAIRAN, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	OAP	2	

51	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
52	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PERENCANAAN	OAP	1	
53	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI BINA KONSTRUKSI	OAP	1	
54	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OAP	2	
55	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	OAP	1	

56	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM	OAP	1	
57	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI REHABILITASI ANAK DAN LANJUT USIA	OAP	3	
58	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEDOKTERAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	3	
59	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL | SEKSI PENYULUHAN	OAP	2	
60	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK DAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	OAP	2	
61	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PANGAN | SEKSI DISTIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	OAP	1	
62	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	1	

63	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH | SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN	OAP	1	
64	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENILAIAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	OAP	1	
65	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA	OAP	2	
66	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV ENTOMOLOGI KESEHATAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	OAP	1	
67	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PARIWISATA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEPEMUDAAN | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA	OAP	1	

68	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERTANAHAN | SEKSI PENANGANAN SENGKETA TANAH	OAP	1	
69	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
70	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI DATA INFORMASI DAN PENGAWASAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN	OAP	1	
71	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI BINA KONSTRUKSI	OAP	1	
72	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN - D-III TEKNIK KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	

73	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI BINA KONSTRUKSI	OAP	1	
74	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM	OAP	1	
75	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN BANTUAN HUKUM | SUB BAGIAN LITIGASI	OAP	2	
76	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	OAP	1	
77	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
78	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTANIAN - S-1 LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	OAP	2	

79	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	OAP	1	
80	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI INDUSTRI AGRO	OAP	2	
81	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 STATISTIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM	OAP	2	
82	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN | SEKSI STABILISASI HARGA	OAP	1	
83	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK	OAP	2	
84	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG KEPANGKATAN	OAP	1	

85	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
86	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	OAP	1	
87	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH	OAP	2	
88	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV LAYANAN PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI	OAP	2	
89	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	

90	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	3	
91	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	OAP	2	
92	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MATEMATIKA - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI	OAP	3	
93	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Kesejahteraan Rakyat | SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN	OAP	1	
94	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OAP	3	
95	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PELAKSANAAN SDA	OAP	1	

96	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	OAP	1	
97	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS DAN PENATAAN URUSAN	OAP	1	
98	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN BANTUAN HUKUM | SUB BAGIAN LITIGASI	OAP	1	
99	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	OAP	2	
100	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/KAMPUNG ADAT | SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS MASYARAKAT	OAP	3	

101	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/KAMPUNG ADAT | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	OAP	1	
102	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	OAP	1	
103	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	OAP	2	
104	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SMA IPA - SMA IPS - SLTA KEJURUAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	OAP	3	
105	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI KESEHATAN, KELUARGA DAN GIZI	OAP	1	

106	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	OAP	3	
107	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJA SAMA	OAP	1	
108	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 KONSERVASI HUTAN - S-1 BUDIDAYA HUTAN - S-1 KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN	OAP	1	
109	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG PENGADAAN ASN	OAP	2	
110	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	OAP	3	
111	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	OAP	1	

112	PETUGAS PENGAMAN HUTAN DAN HASIL HUTAN	SMK TEKNIK - SMK PERTANIAN - SMA IPA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	OAP	1	
113	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERTANAHAN | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	OAP	2	
114	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI	OAP	2	
115	KONSERVATOR	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 BIOLOGI - S-1 KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	OAP	1	
116	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK | SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	OAP	1	
117	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN I	OAP	1	

118	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK MATERIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	OAP	2	
119	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	OAP	1	
120	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OAP	2	
121	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG JABATAN DAN PROMOSI	OAP	1	
122	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PENSIUN	OAP	2	
123	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
124	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 INFORMATIKA - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 TEKNIK KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	OAP	2	

125	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN	OAP	2	
126	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH II	OAP	1	
127	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	OAP	2	
128	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	1	
129	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI INDUSTRI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PERENCANAAN	OAP	2	

130	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	2	
131	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 GIZI - S-1 STATISTIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 KEPERAWATAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	2	
132	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	OAP	2	
133	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
134	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	OAP	2	
135	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU III	OAP	2	

136	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	OAP	2	
137	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	
138	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI	OAP	2	
139	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 STATISTIKA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI PERWILAYAHAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	OAP	1	
140	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	OAP	3	
141	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	1	

142	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OAP	8	
143	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III GIZI - D-III KEPERAWATAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	OAP	1	
144	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 STATISTIKA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	OAP	2	
145	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	OAP	1	
146	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU III	OAP	2	
147	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN ASN	OAP	2	

148	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SMA IPA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMA IPS - SMK TEKNIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	OAP	25	
149	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	OAP	1	
150	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
151	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	2	
152	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN	OAP	3	

153	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 KIMIA - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	OAP	2	
154	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU IV	OAP	1	
155	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN)	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	OAP	1	
156	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	OAP	1	
157	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWSIATA	OAP	2	

158	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 PETERNAKAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KEWIRAUSAHAAN	OAP	2	
159	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	OAP	2	
160	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	1	
161	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN UMUM	OAP	2	
162	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III PARIWISATA - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III GIZI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	OAP	1	
163	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN ASN	OAP	1	

164	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	3	
165	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGATURAN PERDASUS DAN PERDASI	OAP	1	
166	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU I	OAP	2	
167	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 BIOLOGI - S-1 KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	OAP	2	
168	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	OAP	2	
169	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - D-IV LAYANAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK	OAP	2	

170	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PARIWISATA - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	OAP	2	
171	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III PERIKANAN - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OAP	1	
172	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 KEDOKTERAN HEWAN - S-1 ILMU KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LIGKUNGAN SERTA PERUBAHAN IKLIM	OAP	2	
173	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI) / D-IV EPIDEMIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	OAP	1	
174	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU IV	OAP	1	
175	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	

176	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	OAP	2	
177	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	OAP	2	
178	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SMA IPA - SMA IPS - SMK TEKNIK - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA/SMA SEDERAJAT - SLTA KEJURUAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OAP	8	
179	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	
180	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OAP	1	
181	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	OAP	1	

182	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PEMULIAAN DAN PRODUKSI TERNAK - S-1 PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN	OAP	2	
183	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	OAP	1	
184	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	2	
185	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OAP	2	
186	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
187	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 ILMU GEOGRAFI - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	OAP	2	

188	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	OAP	2	
189	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	OAP	2	
190	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OAP	2	
191	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR	OAP	3	
192	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PENYIAPAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	OAP	1	

193	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH	OAP	1	
194	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI TATA RUANG	OAP	2	
195	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL | SEKSI PENYULUHAN	OAP	2	
196	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN - S-1 KELAUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	
197	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS	OAP	1	
198	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	

199	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	1	
200	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK GEOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI GEOLOGI	OAP	6	
201	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SMK TEKNIK - SMA IPS - SLTA/SMA SEDERAJAT - SMA IPA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	OAP	3	
202	PENATA KELOLA USAHA KETENAGALISTRIKAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI	OAP	2	
203	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	OAP	2	
204	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OAP	2	

205	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	OAP	2	
206	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PENSIUN	OAP	2	
207	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 PSIKOLOGI - S-1 BISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	OAP	2	
208	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK ELEKTRONIKA - SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OAP	1	
209	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 FILSAFAT AGAMA KRISTEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	OAP	2	
210	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK DAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	OAP	2	

211	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	OAP	2	
212	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	OAP	2	
213	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM	OAP	2	
214	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KOPERASI	OAP	1	
215	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA HUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	OAP	1	
216	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI - D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	OAP	2	
217	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN - D-III PERIKANAN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III KELAUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	1	

218	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 BIOLOGI - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	2	
219	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS	OAP	1	
220	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	OAP	1	
221	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TRANSPORTASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL	OAP	1	
222	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	OAP	2	

223	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	D-III TEKNIK PERTAMBANGAN - D-III TEKNIK PERMINYAKAN - D-III TEKNIK PERTAMBANGAN BATUBARA - D-III FARMASI - D-III TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	OAP	3	
224	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEBIDANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OAP	1	
225	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI KESEHATAN, KELUARGA DAN GIZI	OAP	1	
226	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SMA IPA - SMA IPS - SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK TEKNIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	OAP	3	
227	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OAP	2	

228	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I	OAP	1	
229	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI INDUSTRI NON AGRO	OAP	1	
230	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 ILMU PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	
231	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN	OAP	2	
232	ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 BIOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	
233	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU POLITIK - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILSAFAT - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT	OAP	1	
234	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRIBISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	

235	PENYULUH BAHASA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S-1 BAHASA INDONESIA - S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI CAGAR BUDAYA	OAP	1	
236	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	2	
237	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	
238	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN - S-2 DOKTER HEWAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | SEKSI KESEHATAN HEWAN	OAP	1	
239	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT KESEHATAN LINGKUNGAN)	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	OAP	1	
240	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMK TEKNIK - SMA IPA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OAP	1	

241	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	OAP	2	
242	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	OAP	2	
243	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU HUKUM - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	OAP	2	
244	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PELAPORAN	OAP	2	
245	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - D-IV KEARSIPAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN UMUM	OAP	2	
246	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGATURAN PERDASUS DAN PERDASI	OAP	1	

247	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG PENGADAAN ASN	OAP	2	
248	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/KAMPUNG ADAT | SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS MASYARAKAT	OAP	2	
249	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM	OAP	1	
250	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	OAP	2	
251	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI	OAP	2	

252	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III TATA BOGA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM	OAP	3	
253	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OAP	2	
254	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	OAP	2	
255	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN	OAP	1	
256	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR	OAP	4	
257	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 PARIWISATA - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	1	
258	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU TANAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	OAP	2	

259	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ILMU HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	OAP	2	
260	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG KEPANGKATAN	OAP	2	
261	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	OAP	1	
262	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH	OAP	2	
263	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OAP	1	
264	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN KOTA - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	OAP	3	

265	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN | SEKSI STABILISASI HARGA	OAP	1	
266	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI - S-1 MATEMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	OAP	2	
267	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG FISIK PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH | SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KAWASAN STRATEGIS DAN KHUSUS	OAP	2	
268	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
269	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	OAP	3	
270	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 STATISTIKA - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	OAP	3	
271	POLISI KEHUTANAN TERAMPIL	D-III PENYULUHAN KEHUTANAN - D-III KEHUTANAN - D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	OAP	2	

272	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III MESIN OTOMOTIF - D-III PERTAMANAN - D-III TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	OAP	1	
273	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OAP	1	
274	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN	OAP	2	
275	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OAP	3	
276	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI BISNIS - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	OAP	3	
277	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV JASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI TATA RUANG	OAP	1	

278	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OAP	2	
279	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	OAP	3	
280	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH	OAP	2	
281	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	OAP	3	
282	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III HUBUNGAN INTERNASIONAL - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	OAP	3	
283	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERAMPIL	D-III FISIOTERAPI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	OAP	3	

284	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OAP	2	
285	PETUGAS SURVEI GEOLOGI	D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK GEOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI GEOLOGI	OAP	3	
286	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR MINUM	OAP	1	
287	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA | SUB BIDANG PENDIDIKAN,PARIWISATA, KEBUDAYAAN , OLAHRAGA DAN PEMUDA,KESEHATAN,SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	OAP	3	
288	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	OAP	3	

289	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN ASN	OAP	3	
290	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI REHABILITASI ANAK DAN LANJUT USIA	OAP	1	
291	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG FISIK PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH | SUB BIDANG BINA MARGA,DAN CIPTA KARYA	OAP	2	
292	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI - S-1 REKAYASA MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	OAP	2	
293	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN | SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN	OAP	3	
294	KONSULTAN INDUSTRI	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI PERWILAYAHAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	OAP	3	

295	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	OAP	2	
296	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OAP	2	
297	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	OAP	4	
298	EDITOR BUKU	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Kesejahteraan Rakyat | SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN	OAP	2	
299	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET SETDA | Sub Bagian Kearsipan	OAP	2	
300	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OAP	3	

301	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
302	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM	OAP	3	
303	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH	OAP	2	
304	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU SOSIAL - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LIGKUNGAN SERTA PERUBAHAN IKLIM	OAP	3	
305	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI USAHA MIKRO DAN KECIL	OAP	1	
306	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	OAP	3	

307	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIAL - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	OAP	3	
308	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	OAP	6	
309	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI INDUSTRI AGRO	OAP	2	
310	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA | SUB BAGIAN BUDAYA KERJA	OAP	1	
311	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG VERIFIKASI	OAP	3	
312	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	OAP	1	

313	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	OAP	1	
314	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH | SUB BIDANG PENGAWASAN DAN KEBERATAN	OAP	3	
315	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OAP	3	
316	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	OAP	1	
317	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OAP	3	
318	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KEDOKTERAN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KEPENDUDUKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK	OAP	3	

319	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	OAP	1	
320	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - D-IV ANALISIS KEUANGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	OAP	2	
321	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III ALAT BERAT - D-III TEKNIK ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	OAP	1	
322	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH III	OAP	2	
323	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	3	

324	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	OAP	2	
325	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	OAP	2	
326	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	
327	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGATURAN PERDASUS DAN PERDASI	OAP	2	
328	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	1	
329	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN	OAP	2	

330	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	
331	PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 KEDOKTERAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	OAP	3	
332	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III PERHOTELAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEPARIWISATAAN - D-III KOMUNIKASI - D-III PARIWISATA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR	OAP	4	
333	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 AKUNTANSI - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	OAP	3	
334	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	OAP	3	
335	OPERATOR ALAT BERAT	D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	OAP	1	
336	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	3	

337	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI TATA RUANG	OAP	1	
338	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	
339	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU POLITIK - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR	OAP	3	
340	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	OAP	3	
341	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	3	
342	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 KEHUTANAN - S-1 MANAJEMEN HUTAN - S-1 ILMU PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | SEKSI PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	OAP	3	
343	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA ASN	OAP	3	

344	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	OAP	3	
345	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEHUTANAN - S-1 BUDIDAYA HUTAN - S-1 AGRONOMI - S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	OAP	3	
346	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OAP	3	
347	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	OAP	3	
348	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG PENGADAAN ASN	OAP	3	
349	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	OAP	3	

350	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN	OAP	1	
351	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KOPERASI	OAP	1	
352	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OAP	1	
353	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	OAP	2	
354	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	3	
355	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG JABATAN DAN PROMOSI	OAP	3	

356	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA ASN	OAP	3	
357	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OAP	3	
358	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OAP	3	
359	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	1	
360	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
361	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	OAP	4	

362	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI BISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	OAP	2	
363	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 STATISTIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK	OAP	3	
364	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	OAP	3	
365	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 KONSERVASI HUTAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	OAP	3	
366	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN ASN	OAP	3	

367	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SMA IPA - SLTA KEJURUAN - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMA IPS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	OAP	2	
368	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	S-1 KEDOKTERAN HEWAN - S-1 LINGKUNGAN - S-1 KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL | SEKSI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN REHABILITASI LAHAN	OAP	2	
369	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL,BUDAYA,AGAMA	OAP	3	
370	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU II	OAP	3	
371	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI - S-1 TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PELAKSANAAN SDA	OAP	1	
372	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OAP	2	

373	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 PARIWISATA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEPEMUDAAN | SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA	OAP	1	
374	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	OAP	1	
375	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG PENGADAAN ASN	OAP	3	
376	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	OAP	3	
377	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	3	
378	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OAP	3	
379	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	3	

380	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 KEHUTANAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN | SEKSI STABILISASI HARGA	OAP	1	
381	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	OAP	1	
382	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN	OAP	1	
383	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	D-IV GIZI / S-1 GIZI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI KESEHATAN, KELUARGA DAN GIZI	OAP	2	
384	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJA SAMA	OAP	2	
385	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	

386	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	OAP	3	
387	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN KOTA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	OAP	3	
388	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEPEMUDAAN | SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA	OAP	3	
389	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	OAP	4	
390	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OAP	3	
391	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATA LAKSANA | SUB BAGIAN TATA USAHA	OAP	1	

392	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OAP	3	
393	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA | SUB BIDANG PENDIDIKAN,PARIWISATA, KEBUDAYAAN , OLAHRAGA DAN PEMUDA,KESEHATAN,SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	OAP	2	
394	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 PARIWISATA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	OAP	3	
395	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	3	
396	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
397	PETUGAS PENGAMAN HUTAN DAN HASIL HUTAN	SMK PERTANIAN - SMA IPS - SMK TEKNIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PERENCANAAN DAN TATA HUTAN	OAP	2	
398	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	

399	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - D-IV KEARSIPAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	
400	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OAP	3	
401	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	2	
402	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN	OAP	2	
403	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH	OAP	2	
404	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OAP	1	

405	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	OAP	3	
406	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	OAP	2	
407	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN - S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEPEMUDAAN | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA	OAP	1	
408	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 ILMU KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	OAP	1	
409	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA | SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA	OAP	1	
410	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	OAP	3	

411	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU I	OAP	3	
412	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	NON OAP		1
413	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJA SAMA	NON OAP		1
414	PETUGAS PENGAMAN HUTAN DAN HASIL HUTAN	SMK PERTANIAN - SMK TEKNIK - SMA IPA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PENGAWASAN KEHUTANAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	NON OAP		1
415	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERTANAHAN | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	NON OAP		1
416	KONSERVATOR	S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	NON OAP		1

417	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN I	NON OAP		1
418	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK INDUSTRI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NON OAP		2
419	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NON OAP		1
420	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG JABATAN DAN PROMOSI	NON OAP		2
421	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PANGAN | SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	NON OAP		1
422	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PENSIUN	NON OAP		1

423	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN	NON OAP		2
424	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH II	NON OAP		1
425	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	NON OAP		1
426	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NON OAP		1
427	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	NON OAP		1
428	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		1

429	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	NON OAP		1
430	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		2
431	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	NON OAP		1
432	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI	NON OAP		1
433	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	NON OAP		1
434	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI	NON OAP		1
435	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN	NON OAP		2

436	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		2
437	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU III	NON OAP		1
438	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
439	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU III	NON OAP		1
440	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN ASN	NON OAP		1
441	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1

442	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	NON OAP		1
443	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1
444	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU I	NON OAP		1
445	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	S-1 KEDOKTERAN HEWAN - S-1 KEHUTANAN - S-1 ILMU KEHUTANAN - S-1 ANTROPOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LIGKUNGAN SERTA PERUBAHAN IKLIM	NON OAP		1
446	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	NON OAP		1
447	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	NON OAP		1

448	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		1
449	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 PARIWISATA - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	NON OAP		2
450	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III GIZI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	NON OAP		2
451	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - SMK TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		2
452	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	NON OAP		2
453	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN	NON OAP		1

454	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU IV	NON OAP		1
455	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWSIATA	NON OAP		1
456	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN UMUM	NON OAP		1
457	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III MANAJEMEN - D-III GIZI - D-III PARIWISATA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	NON OAP		1
458	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	NON OAP		2
459	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERHOTELAN - D-III TEKNIK LISTRIK - D-III TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1

460	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV LAYANAN PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK	NON OAP		1
461	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI INFRASTRUKTUR INFORMATIKA	NON OAP		2
462	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU IV	NON OAP		1
463	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN - S-1 PEMULIAAN DAN PRODUKSI TERNAK - S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN	NON OAP		2
464	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PETERNAKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	NON OAP		1
465	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	NON OAP		1

466	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NON OAP		1
467	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 ILMU GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	NON OAP		1
468	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	NON OAP		1
469	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	NON OAP		2
470	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	NON OAP		1
471	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NON OAP		1

472	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR	NON OAP		2
473	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 GEOLOGI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PENYIAPAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	NON OAP		2
474	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH	NON OAP		1
475	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI TATA RUANG	NON OAP		1
476	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 KEWIRAUSAHAAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	NON OAP		1
477	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 BISNIS - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NON OAP		1

478	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PANGAN | SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	NON OAP		1
479	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK DAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	NON OAP		1
480	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	NON OAP		1
481	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM	NON OAP		1
482	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III PERIKANAN - D-III KELAUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		2
483	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TRANSPORTASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS	NON OAP		1

484	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	NON OAP		1
485	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PENSIUN	NON OAP		1
486	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - SMK ELEKTRONIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	NON OAP		1
487	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	NON OAP		1
488	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI - S-1 AKUNTANSI - D-IV AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	NON OAP		1
489	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TRANSPORTASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL	NON OAP		1

490	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEBIDANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	NON OAP		2
491	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
492	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRIBISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
493	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMA IPA - SMK TEKNIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	NON OAP		2
494	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 STATISTIKA - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	NON OAP		1

495	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGATURAN PERDASUS DAN PERDASI	NON OAP		1
496	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK MESIN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI	NON OAP		1
497	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG PENGADAAN ASN	NON OAP		1
498	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	NON OAP		1
499	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN II	NON OAP		1
500	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	S-2 DOKTER HEWAN - PROFESI DOKTER HEWAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | SEKSI KESEHATAN HEWAN	NON OAP		1

501	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	NON OAP		1
502	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI KESEHATAN, KELUARGA DAN GIZI	NON OAP		1
503	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	NON OAP		1
504	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		1
505	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUKUM - D-IV KEARSIPAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN UMUM	NON OAP		1
506	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM	NON OAP		1

507	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NON OAP		1
508	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN TATA USAHA	NON OAP		1
509	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	NON OAP		1
510	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI KOPERASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | INSPEKTORAT DAERAH	NON OAP		1
511	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	NON OAP		1
512	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR	NON OAP		1

513	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG KEPANGKATAN	NON OAP		1
514	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU TANAH	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
515	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN	NON OAP		1
516	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	NON OAP		1
517	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III TATA BOGA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM	NON OAP		1
518	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NON OAP		1
519	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/KAMPUNG ADAT | SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS MASYARAKAT	NON OAP		1

520	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PELAPORAN	NON OAP		1
521	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 PARIWISATA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NON OAP		1
522	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	NON OAP		1
523	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI INDUSTRI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PERENCANAAN	NON OAP		1
524	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG PENGADAAN ASN	NON OAP		2

525	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	NON OAP		1
526	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | SEKSI KEDARURATAN DAN DAN LOGISTIK	NON OAP		1
527	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	NON OAP		1
528	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1
529	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PARIWISATA - S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	NON OAP		1

530	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL | SEKSI PENYULUHAN	NON OAP		1
531	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS	NON OAP		2
532	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN BANTUAN HUKUM | SUB BAGIAN LITIGASI	NON OAP		1
533	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		1
534	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1
535	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI GEOLOGI	NON OAP		1

536	PENATA KELOLA USAHA KETENAGALISTRIKAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKSI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI	NON OAP		1
537	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	NON OAP		1
538	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 FILSAFAT AGAMA KRISTEN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	NON OAP		1
539	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KOPERASI	NON OAP		1
540	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	NON OAP		1
541	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	D-III TEKNIK PERMINYAKAN - D-III FARMASI - D-III TEKNIK PERTAMBANGAN BATUBARA - D-III TEKNIK PERTAMBANGAN - D-III TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	NON OAP		2

542	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I	NON OAP		1
543	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN	NON OAP		1
544	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 ILMU KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LIGKUNGAN SERTA PERUBAHAN IKLIM	NON OAP		1
545	PENYULUH BAHASA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - S-1 BAHASA INDONESIA - S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI CAGAR BUDAYA	NON OAP		1
546	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III KOMPUTER AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
547	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 FILSAFAT - S-1 ILMU POLITIK - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT	NON OAP		1

548	ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 BIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
549	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI INDUSTRI NON AGRO	NON OAP		1
550	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SMA IPS - SMK TEKNIK - SLTA/SMA SEDERAJAT - SMA IPA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	NON OAP		1
551	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 BIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1
552	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA HUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	NON OAP		2
553	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	NON OAP		1

554	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMA IPA - SMA IPS - SMK TEKNIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	NON OAP		1
555	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN - S-1 KELAUTAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1
556	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT	NON OAP		2
557	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA HUTAN - S-1 KONSERVASI HUTAN - S-1 KEHUTANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN	NON OAP		1
558	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK | SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	NON OAP		1
559	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	NON OAP		1

560	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NON OAP		1
561	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1
562	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA | SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	NON OAP		1
563	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	NON OAP		3
564	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON OAP		1

565	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	NON OAP		1
566	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SMA IPS - SMA IPA - SMK TEKNIK - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	NON OAP		5
567	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		2
568	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN)	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	NON OAP		1
569	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PETERNAKAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KEWIRAUSAHAAN	NON OAP		1
570	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NON OAP		1

571	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN ASN	NON OAP		2
572	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGATURAN PERDASUS DAN PERDASI	NON OAP		1
573	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU TANAH - S-1 BIOLOGI - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 KIMIA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	NON OAP		1
574	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI) / D IV EPIDEMIOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	NON OAP		1
575	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	NON OAP		1

576	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN TATA USAHA	NON OAP		1
577	PETUGAS UKUR KAWASAN HUTAN	D-III ILMU TANAH - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III SURVEI DAN PEMETAAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL | SEKSI PERHUTANAN SOSIAL	NON OAP		2
578	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SMA IPA - SLTA/SMA SEDERAJAT - SLTA KEJURUAN - SMK TEKNIK - SMA IPS - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NON OAP		2
579	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	NON OAP		1
580	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		1
581	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 FILSAFAT	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	NON OAP		1

582	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	NON OAP		1
583	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III AKUNTANSI - D-III PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	NON OAP		2
584	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	NON OAP		1
585	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN	NON OAP		1
586	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 AKUNTANSI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NON OAP		2
587	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 STATISTIKA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK INDUSTRI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN | SEKSI PERWILAYAHAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	NON OAP		2

588	REGISTRAR	D-III SASTRA INDONESIA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI CAGAR BUDAYA	NON OAP		1
589	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI | BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	NON OAP		1
590	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA - S-1 GIZI - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	NON OAP		1
591	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NON OAP		2

Sorong, 22 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Dr. Drs. MUHAMMAD MUSA'AD, M.Si

KOP SURAT
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA)

Alamat : ……

SURAT KETERANGAN BENAR-BENAR ORANG ASLI PAPUA
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Masyarakat Adat :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl /Lahir : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Status : .....

NIK /KTP : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

Adalah benar-benar Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan keturunan bapak/ibu asal suku ……

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai syarat Pendaftaran Seleksi Pengadaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya formasi tahun 2024 .

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., …… 2024

Mengetahui :
Ketua Lembaga Masyarakat Adat

Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Catatan: Stempel Asli pada Tanda Tangan

Nomor : 800.1.2.1/1218
Tanggal : 2024

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Nomor HP :

Email :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ; dan
8. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan tidak mengajukan pindah keluar dari Provinsi Papua Barat Daya dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....,

.....

Yang Membuat Pernyataan,

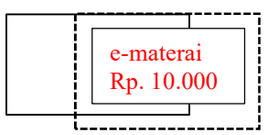

(ttd)

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024

Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp. 10.000

(ttd)

(Nama Lengkap)

FORMAT SURAT LAMARAN
(Diketik dan dicetak dengan tinta Hitam)

Tuliskan Tangal Pendaftaran
(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

Yth. Pj. Gubernur Papua Barat Daya
di-
Sorong

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIK	: .....
Tempat/Tanggal Lahir	: ...../.....
Jenis Kelamin	: .....
Alamat	: .....
Nomor HP	: .....
Email	: .....
Pendidikan	: .....
Perguruan Tinggi,	: .....
SMA/Sederajat	: .....
Jenis Kebutuhan	:.....(isi salah satu OAP/NON OAP)
Jabatan yang Dilamar	: .....
Penempatan	:..... (isi dengan Unit Kerja yang dipilih pada lampiran I)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Keluarga (KK)
3. 3.Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah;
4. Ijazah asli;
5. Transkrip Nilai asli;
6. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
7. Surat pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani di atas e-materai 10.000;
8. Akta kelahiran;**(berlaku bagi OAP DAN Non OAP yang lahir dan besar di wilayah Papua Barat Daya**
9. Surat Keterangan Dari Lembaga Masyarakat Adat yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten /Kota se-Provinsi Papua Barat Daya yang menyatakan bahwa pelamar adalah Orang Asli Papua; **(hanya berlaku bagi OAP)**

10. Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku; **(hanya bagi pelamar Jabatan Apoteker dan Nitrisionis**

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PNS Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

E-Meterai
10.000 *tanda tangan*

(Nama Lengkap)